

PEMBERDAYAAN KELOMPOK NELAYAN MELALUI PROGRAM SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI DESA DALUM KECAMATAN SALIBABU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

(Studi Kelompok Nelayan Pada Koperasi Teluk Lawasan Indah)

Juliati Prihatini¹, Preisy Celin Elungan ^{*2}, M. Rifai³

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor 45363, Indonesia; e-mail: julie_pri@ipdn.ac.id

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor 45363, Indonesia; e-mail: celinelungan@gmail.com

³Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor 45363, Indonesia; e-mail: rifai@ipdn.ac.id

*Correspondence

Received: 13-05-2022; Accepted: 27-06-2022 ; Published: 28-06-2022

Abstrak: Desa Dalum adalah salah satu desa di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, namun demikian nelayan di Desa Dalum merupakan nelayan yang belum sepenuhnya berdaya atau belum maju padahal pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud sudah melakukan pemberdayaan bagi kelompok nelayan yang ada di Desa Dalum melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan kelompok nelayan melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Desa Dalum Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud Studi Kelompok Nelayan pada Koperasi Teluk Lawasan Indah yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud dilaksanakan dengan empat indikator yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Melalui keempat indikator tersebut proses pemberdayaan telah berjalan, akan tetapi masih banyak kekurangan – kekurangan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan seperti: rendahnya keberadaan tingkat Pendidikan kelompok nelayan terkait teknologi yang digunakan, sarana dan prasarana yang digunakan kelompok nelayan masih sederhana, ketergantungan kelompok nelayan pada bantuan yang diberikan pemerintah, dan belum cukup nya ketersediaan listrik di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kata Kunci: Kelompok Nelayan, Pemberdayaan, Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu

Abstract: Dalum Village is one of the villages in the Talaud Islands Regency with its residents mostly living as fishermen, however, fishermen in Dalum Village are fishermen who are not fully empowered or have not been developed even though the government through the Fisheries Service of the Talaud Islands Regency has empowered fishermen groups in Dalum Village through the Integrated Marine and Fisheries Center Program. This study aims to describe and analyze the empowerment of fishermen groups through the Integrated Marine and Fisheries Center Program, inhibiting factors

and supporting factors for the implementation of empowerment and efforts made in overcoming inhibiting factors. The design of this study is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations and documentation. Data analysis techniques are carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the Empowerment of Fishermen Groups through the Integrated Marine and Fisheries Center Program in Dalum Village, Salibabu District, Talaud Islands Regency, Fishermen Group Study at the Teluk Lawasan Indah Cooperative conducted by the Fisheries Service of the Talaud Islands Regency was carried out with four indicators, namely human development, business development, environmental development and institutional development. Through these four indicators, the empowerment process has been running, but there are still many shortcomings that are obstacles in the implementation of empowerment such as: the low level of education of fishermen groups related to the technology used, the facilities and infrastructure used by fishermen groups are still simple, the dependence of fishermen groups on assistance provided by the government, and the lack of sufficient availability of electricity in the Island Regency area Talaud.

Keywords: Fishing Group, Empowerment, Integrated Marine and Fisheries Center Program

I. Pendahuluan

Menjadi salah satu negara kepulauan sekaligus dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia adalah negara dengan wilayah perairan dan bentang pantai yang sangat luas (Suwandi & Prihatin, 2020). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi laut yang sangat besar khususnya dalam bidang perikanan, dimana salah satu yang memiliki peran penting dalam pembangunan adalah bidang perikanan (Kusdiantoro et al., 2019). Bukan tidak mungkin dengan tersedianya potensi yang besar, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi *odyssey to prosperity* atau jalan bagi masyarakat Indonesia menuju kemakmuran (Suman, A., Irianto, E., Satria, F., & Amri, 2016). Melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih oleh pemerintah pusat untuk dapat mengurus urusan daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkannya tentu tidak terlepas dari setiap kebijakan pemerintah, sebab hal penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan peningkatan kesejahteraan adalah peran pemerintah sendiri dalam membangun masyarakat (Lala et al., 2020).

Dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan ada lima, meliputi: pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Melalui kelima fungsi ini pemerintah harus berupaya mewujudkan kemandirian masyarakat salah satunya dengan melaksanakan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk membentuk sumber daya manusia terutama untuk membentuk perilaku dan taraf hidup yang lebih berkualitas (Sahyana, 2017). Secara mendasar perlu diketahui bahwa bila masyarakat

telah berdaya maka pemerintah telah melaksanakan tugas dan kewajiban utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945 (Asimu & Hapsari, 2018).

Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk dalam wilayah kepulauan Indonesia dengan potensi laut yang besar. Bidang perikanan menyimpan begitu banyak kekayaan laut yang belum tersentuh sampai saat ini. Sebagai daerah bahari dengan wilayah laut yang sangat luas, masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud sebagian besar tinggal di daerah pesisir, bermata pencaharian sebagai nelayan dan memanfaatkan hasil laut sebagai sumber utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari sembilan belas kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Salibabu. Kecamatan Salibabu terdiri dari enam Desa dan dari ke enam desa tersebut terdapat salah satu desa, yaitu Desa Dalam yang menjadi wilayah yang ditetapkan sebagai tempat pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) adalah Program Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dibangun pada tahun 2016 dengan tujuan mengintegrasikan program bisnis hulu-hilir yang berbasis pada masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, di pulau – pulau kecil kawasan perbatasan secara berkelanjutan.

Sejak tahun 2017 Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan berbagai pemberdayaan melalui program SKPT Talaud seperti:

1. Peningkatan kapasitas nelayan;
2. Pengoperasian alat tangkap rawai dasar;
3. Manajemen mutu ikan;
4. Manajemen usaha perikanan dan kelautan;
5. Perawatan mesin penggerak kapal ikan;
6. Pengolahan serta pemasaran hasil perikanan; dan
7. Peningkatan kapasitas koperasi terkait manajemen administrasi keuangan dan administrasi koperasi.

Program pemberdayaan SKPT Talaud telah diikuti oleh 13 Koperasi dan 3 BUMDes di Kabupaten Kepulauan Talaud salah satunya adalah Koperasi Teluk Lawasan Indah. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada Koperasi Teluk Lawasan Indah yang mewadahi kelompok nelayan, dimana kelompok nelayan tersebut terdiri dari tiga kelompok Usaha Bersama, yaitu: Kelompok Usaha Bersama Malalugis, Kelompok Usaha Bersama

Amalis, dan Kelompok Usaha Bersama Talenta, dengan jumlah anggota koperasi seluruhnya 80 orang.

Penulis fokus kepada kelompok nelayan dalam Koperasi Teluk Lawasan Indah karena kelompok nelayan ini paling dekat dengan lokasi SKPT Talaud, dimana mereka yang paling leluasa untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Namun demikian sampai saat ini Kelompok Nelayan pada Koperasi Teluk Lawasan Indah walaupun telah diberdayakan melalui Program SKPT tetapi belum sepenuhnya mandiri. Hal tersebut disebabkan oleh masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional seperti pancing ulur, alat tangkap rawai dasar, dan tombak (*jubi ikan*), selain itu masih rendahnya pendapatan kelompok nelayan, ikan hasil tangkapan yang belum mampu diolah oleh kelompok nelayan, serta masyarakat masih sering bergantung pada bantuan dari pemerintah. Melalui uraian permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan serta apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dengan Studi Kelompok Nelayan pada Koperasi Teluk Lawasan Indah.

II. Kajian Pustaka

1. Konsep Pemberdayaan

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dalam Nurjannah et al (2020), pemberdayaan berasal dari kata daya yang mengandung arti “kekuatan” dan merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris “*empowerment*”, sehingga ketika dijabarkan pemberdayaan berarti pemberian daya atau kekuatan kepada kelompok lemah yang belum berdaya untuk hidup mandiri dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan. Pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya, baik daya dalam pengertian kemampuan dan keberanian maupun daya dalam arti kekuasaan atau posisi-tawar (Mardikanto & Soebiato, 2012). Tujuan dari pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan (Yustina Daruit, 2021). Pemberdayaan adalah bagian dari pembangunan yang memfokuskan perhatiannya pada aspek prinsipil manusia dilingkungan, yakni mulai dari aspek intelektual, manajerial, hingga kepada aspek material dan fisik (Sutarto, 2018). Pemberdayaan sering dikaitkan dengan

peran pemerintah sebagai regulator dalam menyiapkan arah untuk mewujudkan kemandirian bagi seluruh masyarakat (Windasai, 2021).

Terkait dengan pemberdayaan ada empat hal penting yang menjadi pokok dalam pemberdayaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardikanto & Soebiato (2012) yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan.

1) Bina Manusia

Bina Manusia merupakan pokok penting dalam pemberdayaan karena tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk memberikan keberdayaan yang didalamnya meliputi kemampuan dan perbaikan dalam mutu hidup untuk mencapai kesejahteraan. Adapun proses pemberdayaan yang dilakukan dalam bina manusia meliputi kegiatan pengembangan, pengkapasitasan dan pemberian keterampilan bagi sumber daya manusia yang terdiri dari individu dan kelompok.

2) Bina Usaha

Dalam pemberdayaan pada dasarnya bina usaha merupakan bagian penting dan tak terpisahkan. Hal ini dikarenakan bina usaha berorientasi pada perbaikan kesejahteraan, dimana dampak atau manfaat yang diberikan sangat besar bagi masyarakat dalam perbaikan dan peningkatan ekonomi.

3) Bina Lingkungan

Sejak perkembangan model pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), isu lingkungan menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan. Saat ini lingkungan tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik yang terlihat di alam, karena didalamnya ada lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah keberadaan makhluk sosial dimana lingkungan sosial juga tidak kalah penting karena lingkungan sosial akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan selanjutnya.

4) Bina kelembagaan

Pada hakekatnya efektivitas jalannya suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dari bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Pengertian kelembagaan yang biasanya hanya diartikan sebagai sebuah kelompok atau organisasi sebenarnya memiliki arti yang sangat luas, dimana kelembagaan memiliki peran penting dalam pembentukan relasi sosial yang keberadaannya bukan hanya untuk menggambarkan tentang keberadaan para anggota atau individu – individu yang ada didalamnya, akan tetapi bagaimana keberadaan kelembagaan mampu memberikan dampak dan berfungsi dalam diri masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan meningkatkan pengetahuan.

2. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang secara geografis hidup dan menetap di kawasan pesisir (Septiana Sinta, 2018). Adapun masyarakat pesisir berarti kelompok masyarakat yang hidupnya masih tertinggal (Irdansyah & Eliza, 2018). Suharto dalam Suryadi & Sufi (2019) menjelaskan bahwa, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Pemberdayaan masyarakat nelayan adalah segala usaha yang dilakukan secara sadar,

terencana, terarah, sistematis dan berkesinambungan sebagai wujud dalam membangun kemandirian, baik sosial, politik dan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan (Sitompul, 2015). Menurut Muhammad (2012) pemberdayaan bagi masyarakat nelayan dilakukan melalui dua bagian yakni pemberdayaan secara individu maupun pemberdayaan secara berkelompok dengan karakteristik sosial budaya sebagaimana yang dijelaskan oleh Fargomeli (2014), yaitu :

- a) Memiliki struktur relasi *patron - klien* yang kuat;
- b) Etos kerja yang tinggi;
- c) Selalu memanfaatkan kemampuan diri secara optimal;
- d) Memiliki keahlian, keterbukaan dan ekspresif; dan
- e) Memiliki keahlian yang tinggi.

3. Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan implementasi dari Nawa Cita poin ke tiga yang berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Dalam pelaksanaannya pengembangan SKPT terdiri dari empat hal, yaitu peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing, modernisasi dan korporatisasi usaha, dan penguatan produksi dan produktivitas pelaku utama dan pelaku usaha perikanan (Zamroni et al., 2019). Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan konsep pembangunan ekonomi yang memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah, dengan pendekatan sistem manajemen kawasan yang memegang prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi (Hasan et al., 2019).

4. Koperasi

Koperasi adalah sebuah organisasi yang berdiri karena sekumpulan individu yang sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang bergerak dibidang ekonomi. Pada dasarnya koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat menggerakkan perekonomian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat (Liastiana, I., Murniati, K., Mutolib, A., & Yanfika, 2021). Koperasi sebagai “Soko Guru” adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari tata perekonomian nasional (Rohmat, 2015).

III. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut David Williams dan Moleong dalam Tohirin (2012), penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui latar belakang,

menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik untuk meneliti secara alamiah. Sebagai pelengkap dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pola dasar atas data asli (tidak ditransformasikan dalam bentuk angka), serta hasil yang diperoleh berupa paparan – paparan mengenai situasi dan kondisi yang diteliti yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa naratif (Gunawan, 2016). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari kegiatan Wawancara (*interview*), Observasi (*observation*) dan Dokumentasi terhadap seseorang (informan) yang dilakukan secara langsung dilapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui Dinas, yang ada kaitannya dengan proses Pemberdayaan.

Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Hardani et al (2020), yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*verification*). Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud, Field Manager SKPT Talaud, Kepala Desa Dalum, 6 Orang Anggota Kelompok Nelayan pada Koperasi Teluk Lawasan Indah dan 6 Orang Masyarakat Desa Dalum. Penentuan informan dilakukan dengan didasarkan pada teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* menurut Sugiyono (2015), dengan tujuan dan pertimbangan bahwa *purposive sampling* digunakan untuk menentukan informasn sebagai orang yang benar – benar mengetahui dan menguasai setiap objek yang diteliti hingga mampu memberikan informasi yang jelas, dalam hal ini adalah: Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud, Field Manajer SKPT Talaud, Kepala Desa Dalum dan Kelompok Nelayan pada Koperasi Teluk Lawasan Indah. Sementara *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang digunakan untuk informan yang mula – mula kecil kemudian menjadi besar, dalam hal ini seperti Masyarakat Desa Dalum.

IV. Hasil Dan Pembahasan

1. Gambaran Umum

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara dengan ibukota kabupaten bernama Melonguane. Saat ini Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari 19 kecamatan dan 153 Desa/Kelurahan. Dari 19 Kecamatan salah satu di antaranya bernama Kecamatan Salibabu. Saat ini Kecamatan

Salibabu terdiri dari 6 Desa dan dari ke enam desa tersebut salah satu diantaranya bernama Desa Dalam. Desa Dalam merupakan desa yang ditetapkan sebagai lokasi khusus pelaksanaan penelitian, dimana Desa ini merupakan tempat berdirinya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu juga tempat berdirinya Kelompok Nelayan pada Koperasi Teluk Lawasan Indah yang melaksanakan pemberdayaan melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Pemberdayaan Kelompok Nelayan pada Koperasi Teluk Lawasan Indah

Dalam pelaksanaannya pemberdayaan kelompok nelayan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan melalui empat indikator pokok seperti yang dikemukakan oleh Mardikanto & Soebiato (2012) dalam pemberdayaan, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan.

a. Bina Manusia

Dalam bina manusia pelaksanaan pemberdayaan oleh Dinas Perikanan bagi kelompok nelayan dilakukan melalui: Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Individu & Kelompok). Melalui kegiatan observasi yang penulis lakukan didapati bahwa kegiatan pemberdayaan dilakukan mulai dari sosialisasi kepada kelompok nelayan hingga pelaksanaan pelatihan – pelatihan secara langsung di lapangan. Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Julianto Parauba, S.IK, M.Sc selaku Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 5 Januari 2022, dijelaskan bahwa:

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok nelayan seperti cara penangkapan ikan, cara penanganan ikan di atas kapal, cara pengelolaan ikan, hingga cara bagaimana merawat mesin serta alat – alat yang digunakan saat setelah pelaksanaan penangkapan ikan. Secara umum pelaksanaan pemberdayaan berjalan baik akan tetapi dalam penangkapan ikan alat – alat yang digunakan masih sangat sederhana.

Di sisi lain untuk memperkuat hasil wawancara tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Grace Daruit selaku Pengurus dan Anggota Koperasi Teluk Lawasan Indah pada tanggal 8 Januari 2022, dijelaskan bahwa:

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu, secara langsung dengan turun ke lapangan memberikan sosialisasi, serta memberikan pelatihan tentang bagaimana cara penangkapan ikan, bagaimana cara penanganan ikan, menjaga kualitas ikan agar dijual masih dengan harga terbaik, hingga bagaimana merawat alat – alat atau sarana dan prasarana yang gunakan. Akan tetapi memang alat – alat yang digunakan masih sangat sederhana, selain karena masalah kekurangan dana para nelayan pun masih sangat kurang dari sisi pengetahuan

sehingga rata – rata lebih suka menggunakan alat – alat tangkap yang sekiranya mudah dan lebih cepat mereka kuasai.

Melalui hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa sejauh ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Dinas Perikanan telah melakukan fungsi pembangunan melalui kegiatan pemberdayaan khususnya dalam Bina Manusia dengan baik, namun demikian yang membuat kelompok nelayan khususnya pada koperasi teluk lawasan indah belum mengalami kemajuan adalah dari sisi penggunaan alat–alat tangkap yang terbilang masih sederhana.

b. Bina Usaha

Bina usaha merupakan upaya penting yang selalu dilakukan kepada kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah untuk memberikan dampak ekonomi yang baik. Bina usaha dalam hal ini dapat diartikan sebagai pemberian pembinaan pada ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu indikator pemberdayaan, bina usaha dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:

1) Pemilihan Komoditas dan Jenis Usaha.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, didapati bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam hal pemilihan komoditas dan jenis usaha, yang disarankan bagi kelompok nelayan adalah memilih komoditas ikan laut karena komoditas ikan selain komoditas dengan potensi paling besar juga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh para nelayan. Hal ini didukung oleh wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Julianto Parauba, S.IK, M.Sc selaku Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal, 5 Januari 2022, dijelaskan bahwa:

Dari segi pemilihan komoditas dan jenis usaha, komoditas yang dapat dipilih untuk dijadikan sebagai sebuah usaha ada banyak akan tetapi kami menyarankan kepada nelayan untuk memilih komoditas ikan laut karena komoditas ikan selain komoditas dengan potensi paling besar juga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh para nelayan.

Melalui wawancara diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam bina usaha khususnya pemilihan komoditas dan jenis usaha, dengan banyaknya komoditas yang ada para nelayan dapat memilih apa saja komoditas dan jenis usaha yang akan dilakukan,

akan tetapi dalam pelaksanaan pemberdayaan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud menyarankan agar komoditas yang dipilih adalah komoditas ikan laut.

2) Perbaikan Manajemen

Melalui pemberdayaan, dalam bidang perbaikan manajemen kelompok nelayan diajarkan untuk dapat melakukan manajemen yang baik yaitu pada bagian administrasi dan manajemen keuangan. Pemberdayaan dalam manajemen administrasi meliputi pengelolaan surat – surat penting dan pengelolaan data – data hasil tangkapan ikan dari nelayan koperasi, sedangkan dalam manajemen keuangan adalah bagaimana keuangan yang diperoleh dari hasil penjualan ikan dapat dikelola, membagi dan mengimbangi antara pemasukan dan pengeluaran. Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Grace Daruit selaku pengurus dan anggota dari kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah pada tanggal 8 Januari 2022, dijelaskan bahwa

Dalam hal perbaikan manajemen dari pemerintah sendiri memang sudah mengajarkan kelompok nelayan khususnya yang ada di koperasi teluk lawasan indah, untuk dapat melakukan pengelolaan manajemen yang baik dari segi manajemen administrasi maupun manajemen keuangan, sehingga sampai saat ini sudah banyak perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam koperasi teluk lawasan indah, dimana setiap pemasukan dari hasil penjualan ikan sudah dapat dikelola dengan baik.

Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan pada indikator bina usaha khususnya pada perbaikan manajemen berjalan dengan baik dimana kelompok nelayan khususnya pada koperasi teluk lawasan indah sudah dapat melakukan manajemen dengan baik.

3) Peningkatan Aksesibilitas Modal, Pasar dan Informasi

Melalui kegiatan sosialisasi dalam hal peningkatan aksesibilitas modal, pemerintah membantu kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah agar mampu memperoleh bantuan dana dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam peningkatan pasar pemerintah mensosialisasikan agar kelompok nelayan dapat selalu lihai melihat situasi dan kondisi pasar, antara permintaan dan ketersediaan produk haruslah seimbang, serta mampu memanfaatkan peluang pasar seperti kebutuhan masyarakat akan ikan harus tersedia setiap hari.

Dalam hal peningkatan informasi pemerintah melalui Dinas Perikanan menekankan khusus kelompok nelayan agar mampu memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk melihat peluang usaha yang ada, agar supaya banyak hal yang dapat diketahui sebagai bagian dari melakukan usaha pemanfaatan hasil perikanan.

4) Pengembangan Jejaring Kemitraan

Dalam bina usaha, membangun jejaring kemitraan adalah sebuah langkah yang baik untuk meningkatkan perekonomian. Sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun kemitraan adalah memberikan sosialisasi bagaimana membangun kemitraan dengan sesama pelaku usaha dan membantu memfasilitasi masyarakat melalui penjualan ikan hingga keluar kota. Melalui wawancara penulis dengan Ibu Grace Daruit selaku pengurus dan anggota koperasi teluk lawasan indah pada tanggal 8 Januari 2022, dijelaskan bahwa:

Dalam hal pengembangan jejaring kemitraan banyak manfaat yang didapatkan, dimana Dinas perikanan mengajarkan bagaimana membangun jejaring kemitraan, misalnya seperti bekerja sama dengan rumah makan yang membutuhkan stok atau pasokan ikan hingga dengan pasar- pasar atau pabrik – pabrik yang melakukan pengolahan ikan, agar supaya kelompok nelayan bisa memiliki pelanggan tetap yang bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam peningkatan perekonomian.

5) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung

Pada bina usaha, sebagai salah satu pendukung untuk dapat melakukan sebuah usaha dan mengembangkan usaha tersebut, tentu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil observasi di lapangan selama melaksanakan pemberdayaan alat, sarana dan prasarana yang digunakan adalah yang berasal dari swadaya kelompok nelayan yang sifatnya masih sangat sederhana seperti, kapal penangkapan, alat tangkap dan alat pengelolaan hasil tangkapan ikan. Adapun sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini melalui kementerian kelautan dan perikanan terpadu berupa kapal penangkapan ikan, akan tetapi belum tepat sasaran, karena kapal penangkapan ikan tersebut tidak cukup baik digunakan di perairan Kabupaten Kepulauan Talaud yang memiliki cuaca yang mudah berubah dan bergelombang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Jus Daruit selaku pengurus dan nelayan pada koperasi teluk lawasan indah pada 8 Januari 2022, dijelaskan bahwa :

Bantuan yang berikan oleh pemerintah bagi nelayan memang ada, contohnya seperti kapal penangkapan ikan, mesin penangkapan ikan dan alat tangkap ikan, akan tetapi khusus untuk kapal pengkapan ikan sampai saat ini bantuan yang diberikan belum sesuai

dimana kapal penangkapan yang diberikan tidak cocok digunakan untuk penangkapan ikan di perairan Kabupaten Kepulauan Talaud, karena kalau mengalami cuaca yang agak bergelombang kapal penangkapan tersebut bisa saja tenggelam atau mudah pecah.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal pemberian sarana dan prasarana harus lebih tepat sasaran agar kelompok nelayan selain merasa terbantu dengan bantuan yang diberikan juga apabila bantuan tepat sasaran bantuan tersebut akan sangat bermanfaat.

c. Bina Lingkungan

Dalam mengembangkan suatu usaha, lingkungan menjadi salah satu bagian penting yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha. Ada dua aspek sebagai bagian terpenting dari indikator bina lingkungan yang harus diperhatikan yaitu:

1) Lingkungan Fisik

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, selama pelaksanaan pemberdayaan keberadaan lingkungan fisik baik alam sekitar maupun lokasi khusus di sentra kelautan dan perikanan terpadu berada dalam keadaan baik dan terjaga. Hanya saja yang didapati bahwa pihak pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu masih membuang limbah hasil pembersihan ikan di pinggir pantai yang menyebabkan bau tidak sedap disekitar daerah pantai di Desa Dalam. Melalui wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan Ibu Miyati selaku masyarakat Desa Dalam pada tanggal 10 Januari 2022, dijelaskan bahwa:

Memang benar saat pelaksanaan pemberdayaan antara pemerintah dan kelompok nelayan dilaksanakan dengan baik dengan tetap menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar, akan tetapi dari pihak pengelola sentra kelautan dan perikanan terpadu ketika melakukan pembersihan ikan yang mereka beli yang selanjutnya akan dijual, didapati mereka masih sering membuang limbah hasil pembersihan ikan di sembarang tempat contohnya seperti di pinggir pantai sehingga hal tersebut menimbulkan bau busuk di sekita area pantai.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Deni Lawongo, SE selaku Kepala Desa Dalam pada tanggal 7 Januari 2022, dijelaskan bahwa :

Sebagai dampak dari pelaksanaan pemberdayaan kepada kelompok nelayan mereka jadi lebih produktif dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Para nelayan jadi lebih peka untuk selalu menjaga kebersihan di laut dengan tidak membuang sampah di pantai, hal tersebut banyak diikuti oleh masyarakat lain sebagai penduduk di Desa Dalam, namun yang perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah adalah agar supaya dapat mengarahkan pihak pengelola sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk tidak lagi membuang limbah sisa pembersihan ikan ke pinggir pantai agar tidak menimbulkan kerusakan pada ekosistem laut dan mencemari lingkungan.

Melalui hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa selama pelaksanaan pemberdayaan lingkungan fisik selalu terjaga dan jauh dari pencemaran tetapi pada sisi lain ternyata didapati bahwa pengelola SKPT Talaud membuang limbah hasil pembersihan ikan dipinggir pantai yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan bau tidak sedap disekitar area pantai. Hal tersebut perlu menjadi perhatian lebih pemerintah agar tidak dilakukan secara terus – menerus.

2) Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam indikator bina lingkungan. Keadaan sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pelaksanaan pemberdayaan saat ini kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah sudah lebih produktif, mereka sudah terus - menerus melaksanakan kegiatan pemanfaatan potensi perikanan dari pada sebelumnya. Melalui sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kelompok nelayan sudah lebih paham bagaimana mereka harus memanfaatkan perikanan dengan baik, selanjutnya dari segi bantuan mereka diharapkan lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah. Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Grace Daruit selaku pengurus dan anggota koperasi teluk lawasan indah pada tanggal 8 Januari 2022, dijelaskan bahwa:

Pemberdayaan yang dilakukan khusus pada lingkungan sosial menjadikan para nelayan lebih memiliki pola pikir yang terbuka dan lebih luas ke depan. Antara masing – masing individu dan sesama anggota koperasi mereka menjadi lebih peduli satu sama lain sehingga membuat keberadaan koperasi lebih hidup untuk terus bergerak dan maju kedepan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan pada indikator bina lingkungan. baik lingkungan fisik dan lingkungan sosial, kedua – duanya memiliki hasil tersendiri. Pada lingkungan fisik pemerintah telah berusaha menyampaikan kepada nelayan agar selalu menjaga kelestarian alam ditengah berbagai kegiatan yang dilakukan, sedangkan pada lingkungan sosial, banyak dampak positif yang dirasakan dimana kelompok nelayan baik individu maupun sebagai sesama dalam koperasi semakin sadar bahwa kegiatan mencari ikan harus terus berlanjut agar membuat mereka semakin mandiri dan produktif untuk maju kedepan.

d. Bina Kelembagaan

Sebagai bagian dari pemberdayaan bina kelembagaan berperan penting dalam suksesnya pelaksanaan pemberdayaan. Adapun pemberdayaan yang dilakukan dalam bina kelembagaan terdiri dari:

1) Komponen Person

Pemberdayaan yang dilakukan khususnya dalam komponen person adalah bagaimana membentuk kemampuan dari masing – masing orang atau individu dalam kelembagaan koperasi teluk lawasan indah agar terus termotivasi dalam melakukan segala sesuatu yang sifatnya positif dan menguntungkan untuk peningkatan ekonomi. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Julianto Parauba, S.IK, M.Sc selaku Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 5 Januari 2022, dijelaskan bahwa:

Bina Kelembagaan yang dilakukan adalah ber sosialisasi langsung dengan mereka, memberikan arahan serta berbagai macam masukan yang berkaitan dengan kegiatan mereka dalam pemanfaatan hasil perikanan, selain itu mereka diberikan arahan bagaimana menjalankan roda organisasi dalam koperasi, berusaha agar dapat memanfaatkan segala fasilitas yang telah diberikan pemerintah dengan baik, terlebih semangat dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Selanjutnya melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Jus Daruit selaku pengurus dan nelayan di koperasi teluk lawasan indah pada tanggal 8 Januari 2022, dijelaskan bahwa:

Paling utama dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sosialisasi pemberian motivasi bagi kelompok nelayan, apalagi melihat situasi sekarang banyak organisasi bersama yang dibentuk seperti koperasi akan tetapi sudah tidak berjalan karena pengurus dan anggota didalamnya tidak mampu bertahan dan berusaha melewati berbagai masalah yang terjadi, sehingga paling utama yang harus diperkuat adalah tekad dan tujuan utama dari seluruh anggota koperasi.

Dengan hasil wawancara dan observasi tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan yang telah dilakukan bagi kelompok nelayan membuat kelompok nelayan menjadi kelompok yang benar – benar ingin maju dan memiliki semangat yang kuat untuk berkembang khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan.

2) Komponen Kepentingan

Komponen kepentingan berbicara tentang seberapa pentingkah kelembagaan itu ada dan diperlukan oleh kelompok nelayan hingga mampu membawa kelompok nelayan lebih maju dan mencapai kesejahteraan. Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Grace Daruit selaku pengurus dan anggota dalam koperasi teluk lawasan indah pada tanggal 8 Januari 2022, dan dijelaskan bahwa:

Pada koperasi teluk lawasan indah seluruh nelayan yang tergabung dalam koperasi baik sebagai pengurus maupun anggota koperasi memiliki tujuan yang sama yaitu sama – sama maju dan sama – sama bisa mencapai kesejahteraan ekonomi melalui koperasi, sehingga segala yang menjadi kepentingan bersama yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pemanfaatan hasil perikanan dikelola dalam koperasi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam bina kelembagaan khususnya pada komponen kepentingan terjadi keselarasan baik dari pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan yang ingin memiliki masyarakat yang lebih maju dan kelompok nelayan yang sama – sama ingin maju dan mencapai kesejahteraan dalam perekonomian.

3) Komponen Aturan

Komponen aturan mengandung arti bahwa semua yang ada dan tergabung sebagai kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah haruslah bisa mematuhi segala aturan yang dibuat baik dalam koperasi maupun aturan diluar koperasi. Dengan pelaksanaan pemberdayaan melalui program sentra kelautan dan perikanan terpadu memberikan pengertian dan ilmu kepada para kelompok nelayan untuk bagaimana membuat aturan dalam koperasi maupun menaati aturan tersebut, sehingga diharapkan, dari aturan – aturan yang mereka buat dapat membawa koperasi kearah yang lebih maju. Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Julianto Parauba, S.IK, M.Sc selaku Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 5 Januari 2022, dijelaskan bahwa: “Dalam Pemberdayaan, kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah dibekali untuk bisa membuat produk peraturan dalam koperasi sebagai bagian dari penertiban dalam organisasi dan bagaimana seluruh anggota untuk bisa menaati aturan – aturan tersebut guna keberlangsungan berdirinya koperasi teluk lawasan indah”. Selanjutnya melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Grace Daruit selaku pengurus dan anggota dalam koperasi teluk lawasan indah pada tanggal 8 Januari 2022, dijelaskan bahwa:

Sebagai bagian dari pengembangan koperasi pengurus dan anggota sepakat untuk membuat sebuah aturan dalam koperasi hal ini untuk keberlangsungan koperasi teluk lawasan indah. Salah satu aturan yang dibuat adalah dengan selalu melaporkan hasil

penjualan ikan oleh nelayan dalam koperasi dan menyetorkan uang iuran dari hasil penjualan tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menopang jalannya manajemen administrasi dan manajemen keuangan terhadap pemenuhan dan perawatan fasilitas yang digunakan dalam penangkapan ikan.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dalam bina kelembagaan khususnya pada komponen aturan, kelompok nelayan sadar dan paham bahwa untuk menjaga dan menjamin keberlangsungan dari berdirinya koperasi adalah dengan membuat sebuah produk aturan, agar supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan

4) Komponen Struktur

Dalam komponen struktur pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman bagi bagian – bagian yang ada dalam struktur organisasi koperasi teluk lawasan indah seperti para pengurus dan anggota didalamnya untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Jus Daruit selaku pengurus dan nelayan di koperasi teluk lawasan indah pada tanggal 8 Januari 2022, dijelaskan bahwa: “Hasil dari pemberian sosialisasi tentang struktur dalam koperasi dan bagaimana struktur itu bekerja memberikan dampak positif, dimana para pengurus dan anggota dalam koperasi bisa memahami posisi serta tugas dan tanggung jawab masing – masing dengan baik dan tidak lagi lalai dalam menjalankan tugasnya”. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian pemberdayaan bagi kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud berjalan dengan baik, sehingga manfaat yang diberikan dari hal tersebut kepada para nelayan sangatlah besar.

3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan pada Koperasi Teluk Lawasan Indah

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Penghambat

Berkaitan dengan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan adalah:

a. Rendahnya keberadaan tingkat Pendidikan kelompok nelayan terkait teknologi yang digunakan

Sebagai salah satu dampak dari adanya kemajuan adalah penggunaan teknologi di masa sekarang. Tidak berbeda dengan sektor kehidupan yang lain, dalam sektor perikanan kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah dituntut untuk mampu menguasai teknologi guna meningkatkan kualitas penangkapan dan pengelolaan ikan yang lebih baik. Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Julianto Parauba, S. IK, M. Sc selaku Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 5 Januari 2022, dijelaskan bahwa: “Dalam pelaksanaan pemberdayaan bagi kelompok nelayan masih terdapat beberapa faktor penghambat salah satunya yaitu seperti: rendahnya keberadaan tingkat Pendidikan dari para nelayan, sehingga hal ini berpengaruh pada teknologi – teknologi yang digunakan khususnya dalam bidang penangkapan dan pengolahan ikan”. Melalui faktor penghambat tersebut dapat diketahui bahwa Pendidikan merupakan bagian yang paling memegang peran penting dalam kehidupan manusia, sebab tanpa Pendidikan yang cukup seseorang tidak dapat dengan mudah melakukan apa yang diinginkan.

b. Ketergantungan kelompok nelayan terhadap bantuan dari pemerintah

Salah satu faktor penghambat pemberdayaan adalah ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah, hal ini disebabkan oleh kurangnya modal yang dimiliki kelompok nelayan untuk memenuhi kebutuhan mereka dari segi sarana dan prasarana. Melalui wawancara penulis dengan Ibu Helda Rapar selaku Field Manager di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu pada tanggal 12 Januari 2022, dijelaskan bahwa:

Masyarakat khususnya para kelompok nelayan merupakan orang – orang yang memiliki tingkat ekonomi yang masih rendah sehingga dalam melaksanakan penangkapan alat – alat yang digunakan tidak sepenuhnya dapat dibeli oleh mereka, hal inilah yang membuat mereka masih mengharapkan bantuan dari pemerintah, hal inilah yang membuat mereka belum produktif dalam melakukan kegiatan sehari – hari.

Melalui faktor penghambat ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan tentu akan berjalan dengan baik apabila kelompok nelayan tidak selalu mau bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu mereka harus berusaha bagaimana mereka dapat terus menangkap ikan meski tidak selalu diberikan bantuan.

c. Keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan ikan (masih bersifat sederhana)

Dalam melakukan pemberdayaan tentu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pemberdayaan tersebut dapat berjalan dengan baik, akan tetapi pada koperasi teluk lawasan indah prasarana yang dimiliki tidak memadai maka hal tersebut menjadi penghambat dalam pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Julianto Parauba, S.IK, M.Sc selaku Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 5 Januari 2022, dijelaskan bahwa :

Dalam pemberdayaan memang sarana dan prasarana yang digunakan masih sederhana, sehingga oleh Dinas Perikanan sendiri pemberdayaan yang diberikan pun disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Hal inilah yang membuat kelompok nelayan cukup lambat dalam mengalami perkembangan, akan tetapi walaupun demikian pemerintah selalu berusaha mencari solusi atas permasalahan – permasalahan yang ada.

Melalui hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang menunjang merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena dengan demikian akan membuat proses pemberdayaan berjalan dengan lancar dan hasil yang diperoleh memuaskan, akan tetapi apabila sarana dan prasarannya tidak menunjang maka meskipun proses pemberdayaan berjalan hasil atau *output* yang diperoleh tidak sebaik yang diharapkan.

d. Belum memadai ketersediaan listrik di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud

Ketersediaan listrik yang belum memadai merupakan sebuah masalah yang bukan hanya dirasakan pada pelaksanaan pemberdayaan bagi kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah di Desa Dalum akan tetapi menjadi salah satu masalah hampir bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam pelaksanaan pemberdayaan sendiri ketersediaan listrik sangat berpengaruh pada pembuatan es yang akan digunakan untuk pengelolaan ikan. Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Jus Daruit selaku pengurus dan nelayan dalam koperasi teluk lawasan indah pada tanggal 8 Januari 2022, dijelaskan bahwa:”Ketika melakukan kegiatan pemberdayaan kendala yang masih dihadapi oleh kelompok nelayan adalah ketersediaan listrik dimana membuat hasil tangkapan ikan kelompok nelayan apabila tidak didinginkan menggunakan es dapat cepat rusak dan tidak bisa digunakan atau dikelola bahkan untuk jangka waktu beberapa hari”. Melalui hasil observasi dan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa masalah atau faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok nelayan pada koperasi

teluk lawasan indah ada beragam, sehingga hal inilah yang membuat kelompok nelayan cukup lambat dalam mengalami kemajuan.

2) Faktor Pendukung

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan bagi kelompok nelayan, yaitu:

a. Adanya Keberadaan dan Potensi Alam yang Melimpah

Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah perairan yang kaya akan hasil lautnya, jika dapat dimanfaatkan dengan baik maka hasil dari pengelolaan potensi laut ini dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat khusus bagi kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Julianto Parauba, S.IK, M.Sc selaku Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 5 Januari 2022, dijelaskan bahwa:

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Talaud sampai saat ini masih sangat melimpah sehingga dengan potensi ini Dinas Perikanan melakukan pemberdayaan bagi kelompok nelayan agar supaya kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah dapat memanfaatkan potensi ini dengan baik khususnya untuk peningkatan perekonomian.

Melalui hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa potensi perikanan yang melimpah dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya kelompok nelayan apabila dapat dimanfaatkan dengan baik.

b. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Berdampak Positif Bagi Nelayan Yang Tergabung pada Koperasi Teluk Lawasan Indah

SKPT Talaud merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam mengembangkan pemanfaatan potensi kelautan di wilayah Kabupaten kepulauan Talaud. Keberadaan SKPT Talaud sangat menguntungkan apabila dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai pendukung terbesar bagi perbaikan ekonomi, serta menjadikan kelompok nelayan lebih produktif dan lebih maju dalam mencapai kesejahteraan yang diinginkan.

c. Dukungan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan

Dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok nelayan melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu pemerintah memberikan dukungan yang sangat besar bagi kelompok nelayan dengan harapan kelompok nelayan dapat lebih mandiri dan lebih maju untuk mencapai kesejahteraan. Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan

Ibu Grace Daruit selaku pengurus dan anggota koperasi teluk lawasan indah pada tanggal 8 Januari 2022, dijelaskan bahwa:

Dalam pemberdayaan kelompok nelayan khususnya pada koperasi teluk lawasan indah pemerintah selalu memberikan dukungan yang besar sehingga kelompok nelayan pun selalu memiliki semangat dalam melaksanakan pemberdayaan, namun demikian kelompok nelayan selalu berharap bahwa melalui pelaksanaan pemberdayaan ini bantuan – bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran agar tidak sia – sia dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Melalui hasil observasi dan wawancara yang dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama dilaksanakannya pemberdayaan kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah karena adanya faktor – faktor pendukung yang besar, baik seperti yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai bagian dari pemberi pemberdayaan maupun yang disampaikan oleh Ibu Grace Daruit selaku anggota dan pengurus koperasi teluk lawasan indah yang menerima pemberdayaan.

4. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pemberdayaan Kelompok Nelayan pada Koperasi Teluk Lawasan Indah

Adapun upaya mengatasi faktor penghambat yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah:

1) Pemberian sosialisasi dan pelatihan bagi kelompok nelayan

Pemberian sosialisasi dan pelatihan bagi kelompok nelayan dilakukan dengan tujuan agar kelompok nelayan dapat memahami bagaimana menjadi nelayan yang baik khususnya dalam pelaksanaan penangkapan ikan dan pengelolaan ikan. Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Julianto Parauba, S.IK, M.Sc selaku Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal, 5 Januari 2022, dijelaskan bahwa :

Pemberian sosialisasi dan pelatihan bagi kelompok nelayan dilakukan sebagai upaya mengatasi masalah pemberdayaan, mengingat salah satu faktor penghambat dalam pemberdayaan adalah keberdaan Pendidikan kelompok nelayan yang masih rendah, sehingga diharapkan melalui sosialisasi dan pelatihan – pelatihan tersebut kelompok nelayan dapat memiliki pengetahuan tambahan khususnya dalam memanfaatkan teknologi.

Dapat disimpulkan bahwa pemberian pengetahuan berupa sosialisasi dan pelatihan memberikan manfaat sangat besar bagi kelompok nelayan sehingga yang sebelumnya belum memahami tentang penggunaan teknologi dapat menjadi paham dan tahu penggunaan teknologi

2) Pemerintah Memfasilitasi Kelompok Nelayan Melalui Pemberian Dana Dari Kerja Sama Dengan LPMUKP

Pemberian fasilitas berupa bantuan dana dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pemberdayaan, ketergantungan kelompok nelayan pada bantuan pemerintah, yang mana diharapkan dana tersebut dapat membantu kelompok nelayan memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan dalam proses pemberdayaan dan penangkapan ikan. Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Julianto Parauba, S.IK, M.Sc selaku Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal, 5 Januari 2022, dijelaskan bahwa: “Pemberian bantuan dana melalui kerja sama dengan LPMUKP dilakukan dengan harapan melalui dana tersebut kelompok nelayan dapat memenuhi segala keperluan mereka dalam proses pemberdayaan dan penangkapan ikan”. Melalui hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud berharap agar supaya melalui bantuan yang diberikan, kelompok nelayan dapat lebih produktif dan menggunakan bantuan tersebut dengan baik.

3) Pemberian bantuan dari pemerintah

Sebagai upaya dalam mengatasi masalah keterbatasan sarana dan prasarana, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan kepada kelompok nelayan berupa kapal penangkap ikan kapasitas <5 *Gross Tonnage*, Mesin kapal dengan kapasitas 15 *Horse Power*, bantuan alat tangkap seperti handline dan rawai dasar. Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Julianto Parauba, S.IK, M.Sc selaku Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal, 5 Januari 2022, dijelaskan bahwa: “Pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan harapan dapat membantu proses pelaksanaan pemberdayaan bagi kelompok nelayan, selain itu diharapkan bantuan ini dapat bermanfaat bagi kelompok nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan dilaut”. Melalui hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa, melalui pemberian bantuan, pemerintah sangat mengharapkan kelompok nelayan dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik untuk pelaksanaan pemberdayaan dan untuk pelaksanaan aktivitas mencari ikan sehari – hari guna meningkatkan perekonomian kelompok nelayan dan perkembangan koperasi teluk lawasan indah.

4) Penyediaan dan perbaikan pada sarana dan prasarana penerangan atau aliran listrik

Masalah ketersediaan listrik merupakan masalah yang sangat berdampak besar bagi jalannya proses pemberdayaan kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah. Namun demikian atas masalah yang terjadi, pemerintah selalu berusaha memperbaiki masalah sehingga pelaksanaan pemberdayaan dapat berjalan dengan baik. Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Julianto Parauba, S.IK, M.Sc selaku Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal, 5 Januari 2022, dijelaskan bahwa: “Sampai saat ini pemerintah selalu berupaya melakukan perbaikan khususnya dalam hal ketersediaan listrik di wilayah Pulau Salibabu sehingga pelaksanaan pemberdayaan dan kegiatan kelompok nelayan yang membutuhkan pemanfaatan arus listrik dapat berjalan dengan baik”. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Grace Daruit selaku pengurus dan anggota koperasi teluk lawasan indah pada tanggal 8 Januari 2022, dijelaskan bahwa:

Saat ini pemerintah sudah mulai melakukan perbaikan pada ketersediaan arus listrik, hal ini merupakan harapan yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat khususnya oleh kelompok nelayan, karena apabila tidak ada listrik yang memadai di daerah kami maka ikan hasil tangkapan kami tidak dapat disimpan dan diolah untuk jangka waktu yang panjang atau mudah rusak. Selain itu keberadaan ketersediaan listrik sangat diperlukan apalagi dalam pembuatan es untuk pendinginan ikan hasil tangkapan.

Melalui hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan bagi kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah telah berjalan sehingga aktivitas kelompok nelayan sesuai dengan harapan tanpa hambatan dan banyak manfaat positif yang diterima oleh kelompok nelayan melalui pelaksanaan pemberdayaan yang diberikan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai pemberdayaan kelompok nelayan melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Di Desa Dalam Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Studi Kelompok Nelayan pada Koperasi Teluk Lawasan Indah, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa: Pelaksanaan pemberdayaan kelompok nelayan dilakukan melalui empat indikator yaitu: Dalam Bina Manusia, nelayan sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan -pelatihan mengenai cara

penangkapan ikan, cara penanganan ikan di atas kapal, cara pengelolaan ikan, hingga cara bagaimana merawat mesin serta alat – alat yang digunakan saat setelah pelaksanaan penangkapan ikan; Pemberdayaan dalam Bina Usaha telah berjalan dengan baik, akan tetapi khusus dalam pengembangan sarana dan prasarana, alat yang digunakan masih terbilang sederhana; Pada Bina Lingkungan pemberdayaan dilaksanakan dengan selalu mengutamakan kelestarian alam akan tetapi didapati pihak SKPT Talaud melakukan pembuangan limbah hasil pembersihan ikan dipinggir pantai dan pada lingkungan sosial kelompok nelayan sudah lebih produktif dan melakukan kegiatan penangkapan ikan secara terus menerus; Pada Bina Kelembagaan pemberdayaan yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan menghasilkan perubahan kondisi kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah. Sementara itu faktor penghambat dalam pemberdayaan kelompok nelayan pada koperasi teluk lawasan indah antara lain; Rendahnya keberadaan tingkat Pendidikan kelompok nelayan terkait teknologi yang digunakan, ketergantungan masyarakat kelompok nelayan terhadap bantuan dari pemerintah, keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan yang digunakan (masih bersifat sederhana), dan belum memadai ketersediaan listrik di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun faktor pendukungnya, adalah adanya keberadaan dan potensi alam yang melimpah, sentra kelautan dan perikanan terpadu berdampak positif bagi nelayan yang tergabung pada koperasi teluk lawasan indah, serta dukungan pemerintah dalam pemberdayaan kelompok nelayan. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat pemberdayaan kelompok nelayan adalah: 1) Pemberian sosialisasi dan pelatihan bagi kelompok nelayan; 2) Pemerintah Memfasilitasi Kelompok Nelayan Melalui Pemberian Dana Dari Kerja Sama Dengan LPMUKP; 3) Pemberian bantuan dari pemerintah, dan 4) Penyediaan dan perbaikan pada sarana dan prasarana penerangan atau aliran listrik.

VI. Daftar Pustaka

- Asimu, M. F. A., & Hapsari, R. D. (2018). Pemberdayaan Petani Rumput Laut Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 3(1), 31–42.
- Fargomeli, F. (2014). *Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur*. III(3).
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. PT Bumi Aksara.
- Hardani, Hikmatul, A. N., Ardiani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (A. Husnu

(ed.)). CV. Pustaka Ilmu Group.

Hasan, U., Harianto, & Sarwanto, C. (2019). *Perencanaan Model Dan Strategi Pengelolaan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (Skpt) Biak Di Kabupaten Biak Numfor, Papua*. 79–92.

Irdansyah, & Eliza, M. (2018). Rekonstruksi Sosial Ekonomi (Studi Bumdes Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 6(2), 119–124. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v6i2.2593>

Kusdiantoro, Fahrudin, A., Juanda, Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). The Performance of Capture Fisheries Development in Indonesia. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 5, 69–84. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra>

Lala, O. A., Kaawoan, J. ;, & Ismail, S. (2020). Peranan Pemerintah Desa dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam di Bidang Perikanan Laut untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuma Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–12.

Liastiana, I., Murniati, K., Mutolib, A., & Yanfika, H. (2021). Pelayanan & Manfaat Koperasi serta Pengaruhnya terhadap Partisipasi Anggota (Studi Kasus Pada Koperasi Jurai Siwo Ragem Kota Metro. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5(1), 168–179. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.01.16>

Mardikanto & Soebiato. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. ALFABETA.

Muhammad, S. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. UB Press.

Nurjannah, S., Ghalyah, Y., Barat, S. K., Data, P., & Data, R. (2020). *Pemberdayaan Nelayan Ekonomi Perbatasan Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*. 13(01), 13–41.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Rohmat, A. B. (2015). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424>

Sahyana, Y. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat). *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9, 157–181. <https://doi.org/10.33701/jt.v8i2.618>

Septiana Sinta. (2018). *Sistem Sosial-Budaya Pantai : Mata Pencaharian Nelayan dan Pengelola Ikan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal*. 13(1).

<http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptk%2B3rLJNuePfgeyx43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://a mg.um.dk/~media/amg/Documents/Policies and Strategies/S>

Sitompul, N. R. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Silo Baru Melalui Program Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (Pdpt). *Jurnal Ilmu Administrasi*.
Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suman, A., Irianto, E., Satria, F., & Amri, K. (2016). *Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Wpp Nri) Tahun 2015 Serta Ops Pengelolaannya*. 8(021), 97–110.

Suryadi, A. M., & Sufi. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 118–140.
<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/na/article/view/3062>

Sutarto, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keluarga Persepektif Gender. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 267–283.

Suwandi, M. A., & Prihatin, S. D. (2020). Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui “Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra” di Jepara, Indonesia. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 231–255.

Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. PT RajaGrafindo Persada.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah

Windasai, S. & H. (2021). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep)*. 2, 793–804.

Yustina Daruit, H. N. & I. S. (2021). *Jurnal Governance. Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Talaud Melalui Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap Di Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT)*, 1(1), 1–8.

Zamroni, A., Suryawati, S. H., Ramadhan, A., & Koeshendrajana, S. (2019). Pengembangan Industri Perikanan Di Kabupaten Pulau Morotai: Sebuah Konsep Ilmiah Untuk Model Integrasi Ekonomi. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 9(2), 15–34.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).